

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini terdapat 17 desa wisata di kecamatan Borobudur, 54 desa wisata di Kabupaten Magelang dan 214 desa wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi wilayah kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) sekaligus berada pada kawasan pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur. Kunjungan wisatawan ke desa wisata belum optimal, hanya beberapa desa wisata atau sekitar 10% yang dinilai berhasil dalam melakukan pemasaran (Agustin: 2022). Fakta ini cukup menjadi alasan mengapa harus dilakukan penyebaran wisatawan dan ditemukan pola baru dalam melakukan upaya pemasaran.

Penyebaran wisatawan di Borobudur tidak merata dan masih berfokus pada zona inti yaitu area utama Candi Borobudur. Sedangkan kunjungan ke desa wisata masih relatif sepi. Data dari BPOB menyatakan bahwa kunjungan terbanyak yang tercatat adalah 9.000 kunjungan ke desa wisata dalam 1 (satu) tahun. Jumlah ini dinilai relatif kecil dan belum memberi dampak ekonomi yang diharapkan. Jika dilihat desa desa lainnya maka angka kunjungan jauh di bawah 9.000 sehingga dinilai belum optimal.

Ketidakmerataan penyebaran wisatawan di kawasan pariwisata Borobudur ini, dapat memberikan dampak bagi kawasan Borobudur itu sendiri dalam berbagai aspek. Pertama, aspek ekonomi dimana kondisi ekonomi di desa wisata menjadi lesu. Kedua, mempengaruhi tingkat ketergantungan sosial terhadap pariwisata, hal ini terjadi sebab masyarakat telah menggantungkannya pada sektor

pariwisata, namun akan menurunkan minatnya ketika tidak adanya pemerataan persebaran wisatawan. Dan yang terpenting adalah poin ketiga, yaitu belum adanya pengembangan kawasan wisata lain dikarenakan tidak meratanya kunjungan wisatawan. Hal ini berdampak atau dapat memengaruhi rencana keberlanjutan suatu destinasi pariwisata.

Pada wawancara pra penelitian yang dilakukan terhadap pelaku wisata ditemukan fakta bahwa belum semua desa wisata melakukan promosi wisata sehingga informasi masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan (Alfian Edward: 2022). Edward menambahkan bahwa belum semua desa wisata mengaplikasikan *digital marketing*, bahkan jika ditanya paket atau produk unggulan apa yang akan dipasarkan sebagian masih merasa bingung. Sehingga dapat disimpulkan selain meningkatkan pemasaran pengembangan produk wisata, desa wisata juga perlu membuat paket wisata yang menarik dan orisinil sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Borobudur hingga tahun 2019 atau satu tahun sebelum ditutup karena pandemi covid-19 mencapai 3,75juta wisatawan (BPS, 2020). Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun menurun drastis saat pandemi covid-19 melanda di awal tahun 2020. Pasca pandemi, tren kenaikan jumlah wisatawan ke Borobudur selalu meningkat. Jumlah wisatawan pada tahun 2022 mengalami peningkatan walaupun tetap belum bisa memenuhi target kunjungan. Tercatat 1,49 juta kunjungan wisatawan dari 1,6 juta yang telah ditargetkan sebelumnya. (Jawa Pos, 2023).

Jumlah wisatawan selalu menjadi perdebatan tersendiri, di satu sisi jumlah wisatawan yang berkunjung diharapkan sebanyak mungkin agar dapat berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat. Namun, apabila dilihat dari sisi konservasi, banyaknya wisatawan yang datang ternyata juga menimbulkan permasalahan baru mengingat Borobudur adalah cagar budaya yang perlu dilindungi agar tidak rusak oleh tangan manusia.

Berbagai upaya muncul dalam menyikapi hal tersebut diantaranya adalah mendorong pengembangan destinasi wisata lingkaran Candi Borobudur seperti pengembangan desa wisata serta pola perjalanan wisata yang mengakomodir wisata lingkaran luar Borobudur. Seiring dengan upaya ini, dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola pada wilayah utama Candi Borobudur yang menjadi konsensus pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan. Pariwisata berkelanjutan diyakini menjadi faktor pendorong utama dan jalan tengah antara konsep kunjungan wisata dan upaya konservasi yang ada di Borobudur. Dalam konsep pariwisata berkelanjutan faktor utama yang menjadi perhatian adalah ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Saat ini tata kelola Borobudur sebagai cagar budaya dilaksanakan oleh Balai Konservasi Kemendikbud meliputi kawasan zona inti atau zona 1. Pada sisi manajemen pariwisata dilaksanakan oleh Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) meliputi zona 2. Sebagai destinasi wisata super prioritas Kemenparekraf melalui Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) memiliki peran dalam *marketing* serta pengembangan pada zona 3 dengan dukungan Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten

Magelang. Sebagai destinasi wisata, Borobudur harus memiliki tata kelola serta memiliki kekhasan daripada destinasi lainnya. Perlu koordinasi antar lembaga guna memenuhi kepentingan serta mencari jalan tengah bagi pemanfaatan Borobudur secara berkelanjutan.

Salah satu perlindungan ini adalah mengarahkan wisatawan bukan hanya pada zona 1 namun pada zona 2 dan 3. Kunjungan pada zona 3 Borobudur salah satunya adalah pada destinasi penyangga termasuk desa wisata. Melalui kunjungan ke desa wisata keberadaan pariwisata bagi masyarakat akan berdampak dan lebih menjahterakan. Sebagai upaya pemanfaatan pariwisata Borobudur untuk masyarakat lokal, kunjungan wisatawan ke zona 3 menjadi penting dan memerlukan dukungan kebijakan dalam tata kelola dan pemasaran. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal sehingga dibutuhkan tata kelola yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Pemasaran menjadi kunci penyebaran wisatawan agar tidak menumpuk pada zona inti sekaligus menjadi upaya penyebaran kemanfaatan bagi masyarakat. Peneliti menganggap bahwa pengembangan model pemasaran sangat penting guna mendukung kelestarian destinasi. Penelitian ini akan memfokuskan model tata kelola oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pengembangan dan pemasaran pada zona 3 meliputi pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang dan Provinsi Yogyakarta.

Borobudur menjadi DSP yang banyak diperbincangkan publik di tahun 2022. Bahkan menjadi *headline* berbagai media dan menjadi pusat perhatian pada pertengahan 2022 akibat rencana kenaikan tarif masuk. Isu ini menjadi ulasan

bukan hanya soal tarif namun terkait dengan tata kelola termasuk kesadaran tentang pariwisata berkelanjutan di wilayah Borobudur. Berbagai perilaku wisatawan mendapat banyak sorotan, khususnya yang mengakibatkan berbagai permasalahan. Ditemukan banyak kerusakan yang bersumber pada perilaku wisatawan sehingga mengancam kelestarian Borobudur sebagai objek wisata. Selain hal tersebut, dari *pre survey* dan wawancara dari pengelola desa wisata lingkaran Borobudur mengeluhkan bahwa tujuan utama masih terpusat pada zona 1 dan 2, sedangkan pengembangan pada zona 3 saat ini sudah dilaksanakan (Sahrodin: 2023).

Penetapan Candi Borobudur sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Perpres No 79 Tahun 2019 menjadikan Borobudur sebagai perhatian utama pariwisata nasional. Meskipun Candi Borobudur telah menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia, keberadaannya masih memerlukan perhatian khusus terlebih mengenai tata kelola sebagai destinasi wisata. Borobudur memiliki fungsi, bukan hanya sebagai destinasi wisata namun juga cagar budaya dan tempat suci bagi umat agama Budha. Kelestarian Borobudur menjadi tujuan utama, sehingga hal ini menjadi fokus dari berbagai kalangan baik pemerintah, masyarakat, komunitas maupun asosiasi dalam upaya pemanfaatan.

Penetapan pengembangan wisata dengan dibentuknya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga Destinasi Super Prioritas (DSP) menunjukkan bahwa pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan nasional. Terdapat 80 KSPN, 50 KEK, dan 5 DSP yang menjadi fokus pengembangan secara nasional. Berbagai DSP yang menjadi kunci percepatan dan fokus utama meliputi Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba,

Likupang dan Borobudur. Masing-masing dari 5 DSP ini memiliki tantangan dan tersendiri. Dua di antara 5 DSP adalah *UNESCO World Heritage*, sehingga menjadi perhatian bukan hanya secara nasional namun menjadi sorotan berbagai masyarakat dan lembaga internasional khususnya dalam tata kelola destinasi.

Saat ini tata kelola Borobudur sebagai cagar budaya dilaksanakan oleh Balai Konservasi Kemendikbud meliputi kawasan zona inti atau zona satu. Pada sisi manajemen pariwisata dilaksanakan oleh Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) meliputi zona 2. Sebagai destinasi wisata super prioritas Kemenparekraf melalui Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) memiliki peran dalam *marketing* serta pengembangan pada zona 3 dengan dukungan Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang. Sebagai destinasi wisata, Borobudur harus memiliki tata kelola serta memiliki kekhasan daripada destinasi lainnya. Perlu koordinasi antar lembaga guna memenuhi kepentingan serta mencari jalan tengah bagi pemanfaatan Borobudur secara berkelanjutan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi penyebaran wisatawan di DSP Borobudur?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan penyebaran wisatawan di DSP Borobudur tidak merata?

3. Program program apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur untuk mendorong penyebaran wisatawan?
4. Apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi permasalahan penyebaran wisatawan di DSP Borobudur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “*Model Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penyebaran Kunjungan Wisatawan Di Kawasan Borobudur*” adalah:

1. Mengetahui kondisi penyebaran wisatawan di kawasan zona 3 DSP Borobudur.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran wisatawan di DSP Borobudur.
3. Menganalisis hal hal yang sudah dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) untuk mendorong penyebaran wisatawan di DSP Borobudur.
4. Menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah penyebaran wisatawan di DSP Borobudur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis *Model Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penyebaran Kunjungan Wisatawan Di Kawasan Borobudur*” ini adalah:

1. Kontribusi terhadap pengetahuan akademis dalam bidang tata kelola pariwisata berkelanjutan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran wisatawan di kawasan Borobudur.
2. Pengembangan teori dan konsep terkait pengelolaan pariwisata berkelanjutan, melalui analisis terhadap langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah penyebaran wisatawan.

Sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini adalah:

1. Memberikan panduan bagi Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) dan pihak terkait lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Borobudur.
2. Memberikan wawasan kepada industri pariwisata dan stakeholders lainnya tentang upaya yang perlu dilakukan untuk mempromosikan dan mengelola kawasan Borobudur secara berkelanjutan.
3. Memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah dalam mengelola pariwisata di kawasan Borobudur agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.